



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5525-5533

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Aspek Hukum Dalam Kontrak Pelayanan Kesehatan: Studi Kasus Mengenai Kewajiban dan Hak Pasien

Yuyut Prayuti<sup>1✉</sup>, Ridho Cahya Dewangga<sup>2</sup>, Kiagus Handrian Parikesit<sup>3</sup>, Mochamad Subhan<sup>4</sup>,  
Yuanita<sup>5</sup>

Hukum Kesehatan, Universitas Islam Nusantara

Email: [prayutiyuyut@gmail.com](mailto:prayutiyuyut@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pelayanan kesehatan adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat, dan kontrak pelayanan kesehatan menjadi instrumen hukum yang memainkan peran kunci dalam pengaturan hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan dengan fokus pada kewajiban dan hak pasien. Penelitian ini menggunakan metode analisis kasus dengan mengambil beberapa studi kasus sebagai sampel untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang perjanjian pelayanan kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontrak pelayanan kesehatan memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pasien dan penyedia layanan. Kewajiban dan hak pasien dalam kontrak pelayanan kesehatan mencakup hak untuk mendapatkan perawatan yang berkualitas, hak untuk informasi yang jujur dan transparan, dan hak untuk mengajukan keluhan serta tuntutan jika terjadi ketidakpatuhan. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan, seperti masalah kepatuhan, perlindungan data pasien, serta penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi dan kerangka hukum yang lebih kuat untuk memastikan pemenuhan hak pasien dan kewajiban penyedia layanan kesehatan. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya kontrak pelayanan kesehatan sebagai alat hukum yang melindungi pasien, serta menggarisbawahi peran hukum dalam menjaga integritas sistem pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk perbaikan dan perubahan kebijakan dalam bidang hukum perdata kesehatan, dengan tujuan akhir untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka.

Kata Kunci: *Kontrak Pelayanan Kesehatan, Kewajiban dan Hak Pasien*

## Abstract

Healthcare services play a crucial role in the lives of individuals, and healthcare service contracts serve as a key legal instrument in regulating the relationships between patients and healthcare providers. This study aims to investigate the legal aspects of healthcare service contracts, with a particular focus on the obligations and rights of patients. The research employs a case analysis method, utilizing several case studies as samples to attain a comprehensive understanding of healthcare service agreements. The analysis reveals that healthcare service contracts play a significant role in maintaining a balance between the rights and obligations of patients and service providers. The obligations and rights of patients in healthcare service contracts encompass the right to receive quality care, the right to honest and transparent information, and the right to lodge complaints and claims in case of non-compliance. Furthermore, this study identifies challenges in implementing the legal aspects of healthcare service contracts, such as compliance issues, patient data protection, and dispute resolution. Therefore, there is a need for regulatory improvements and a stronger legal framework to ensure the fulfillment of patients' rights and the obligations of healthcare service providers. This research offers deep insights into the importance of healthcare service contracts as legal instruments that safeguard patient interests and underscores the role of law in maintaining the integrity of the healthcare service system. The findings of this study can serve as a foundation for policy improvements and changes in the field of healthcare civil law, ultimately aimed at ensuring that patients receive services that are commensurate with their rights.

Keywords: *Healthcare Service Contracts, Patient Obligations and Rights*

## PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan elemen integral dalam kehidupan manusia, yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan individu secara keseluruhan. Di berbagai negara, perawatan medis dan pelayanan kesehatan menjadi hak dasar yang dilindungi oleh hukum untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang layak dan bermutu ke perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Dalam konteks ini, kontrak pelayanan kesehatan muncul sebagai instrumen hukum yang memainkan peran kunci dalam mengatur hubungan antara pasien dan penyedia layanan Kesehatan (Hendrik, 2011). Kontrak pelayanan kesehatan adalah perjanjian tertulis yang menetapkan hak dan kewajiban pasien serta penyedia layanan kesehatan. Dalam konteks hukum perdata, kontrak ini mengikat kedua belah pihak dan menciptakan dasar hukum untuk penyediaan layanan kesehatan. Namun, meskipun kontrak tersebut memiliki tujuan yang jelas dalam mengatur hubungan ini, implementasinya sering kali memunculkan berbagai isu hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan, dengan fokus khusus pada kewajiban dan hak pasien. Kewajiban dan hak pasien dalam kontrak pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk perawatan yang berkualitas, hak atas informasi yang jujur dan transparan, serta hak untuk mengajukan keluhan dan tuntutan jika terjadi ketidakpatuhan. Persepsi tentang kewajiban dan hak ini mungkin bervariasi di antara berbagai negara dan sistem hukum, yang menimbulkan tantangan dalam pemahaman dan implementasi kontrak pelayanan kesehatan.

Studi ini menggunakan metode analisis kasus untuk mengungkap aspek-aspek yang berkaitan dengan kontrak pelayanan kesehatan. Kami akan melihat beberapa studi kasus sebagai sampel, dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif peran dan dampak kontrak pelayanan kesehatan terhadap pasien dan penyedia layanan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan, seperti masalah kepatuhan, perlindungan data pasien, serta penyelesaian sengketa (Ta'adi, 2009).

Dengan menjelajahi aspek-aspek ini, kami berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya kontrak pelayanan kesehatan sebagai alat hukum yang melindungi pasien. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban dan hak pasien dalam kontrak pelayanan kesehatan, kita dapat memperbaiki regulasi dan kerangka hukum yang ada untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien dan kewajiban penyedia layanan kesehatan. Hal ini diharapkan akan membantu menjaga integritas sistem pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan, khususnya dalam konteks kewajiban dan hak pasien. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif perjanjian pelayanan kesehatan dan dampaknya terhadap hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai metode pengumpulan data utama. Pemilihan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendalami berbagai aspek dalam kontrak pelayanan kesehatan dan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban dan hak pasien. Beberapa studi kasus diambil sebagai sampel, yang mencakup berbagai jenis layanan kesehatan dan konteks hukum.

Data akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen kontrak pelayanan kesehatan, dokumen hukum terkait, wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti pasien, penyedia layanan kesehatan, dan advokat hukum, serta analisis dokumen kebijakan. Data juga dapat dikumpulkan melalui survei jika diperlukan untuk mendukung temuan dari studi kasus. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif akan mencakup pengkodean tematik, identifikasi pola-pola, dan penafsiran terhadap informasi yang dihimpun. Data dari berbagai sumber akan digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dalam implementasi aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan dan untuk menggambarkan peran kontrak tersebut dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pasien.

Penelitian ini juga akan mencakup analisis kerangka hukum dan regulasi yang berlaku dalam konteks kontrak pelayanan kesehatan. Hal ini akan membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur kewajiban dan hak pasien serta tantangan dalam penerapan hukum tersebut. Hasil dari studi kasus dan analisis data akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang mencerminkan temuan penelitian. Selain itu, implikasi hasil penelitian terhadap perbaikan regulasi dan praktik dalam kontrak pelayanan kesehatan juga akan dievaluasi. Dengan menerapkan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan, khususnya mengenai kewajiban dan hak pasien. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi perbaikan dan perubahan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak pasien dan kewajiban penyedia layanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Karakteristik Kontrak Pelayanan Kesehatan

Hasil studi menunjukkan bahwa kontrak pelayanan kesehatan memiliki karakteristik yang beragam, termasuk rincian tentang perawatan, biaya, informasi medis, waktu, dan aspek hukum lainnya. Kontrak-kontrak ini dapat bervariasi dalam hal ukuran dan kompleksitas tergantung pada jenis layanan kesehatan yang diberikan, termasuk perawatan rumah sakit, perawatan medis rutin, atau prosedur bedah.

#### 2. Kewajiban Pasien dalam Kontrak

Kewajiban pasien dalam kontrak pelayanan kesehatan mencakup pemenuhan biaya layanan yang disepakati, memberikan informasi medis yang akurat kepada penyedia layanan, dan mengikuti petunjuk perawatan yang telah diberikan. Hasil menunjukkan

bahwa pemahaman pasien terhadap kewajiban mereka dalam kontrak dapat bervariasi, dan dalam beberapa kasus, pasien mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka.

### 3. Hak Pasien dalam Kontrak

Kontrak pelayanan kesehatan juga memberikan hak-hak kepada pasien. Hak-hak ini termasuk hak untuk menerima perawatan berkualitas, hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan transparan tentang diagnosis dan prosedur medis, serta hak untuk mengajukan keluhan atau tuntutan jika terjadi ketidakpatuhan. Hasil menunjukkan bahwa penyedia layanan kesehatan cenderung memahami pentingnya hak pasien dan bekerja untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Hasil penelitian juga menyoroti bahwa penyedia layanan kesehatan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hak pasien dalam konteks kontrak pelayanan kesehatan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab moral dan etis yang diterapkan oleh penyedia layanan dalam menjaga kualitas dan keamanan perawatan pasien (Ashabul Kahfi, 2014). Penting untuk diingat bahwa penyedia layanan kesehatan memegang peran penting dalam memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas sesuai dengan hak mereka. Mereka harus secara cermat mematuhi peraturan hukum dan etika yang mengatur praktik pelayanan kesehatan, serta berkomitmen untuk memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien.

Penyedia layanan kesehatan juga dapat berperan sebagai sumber informasi utama bagi pasien. Dalam hal ini, mereka harus menyediakan informasi medis yang jujur, transparan, dan mudah dimengerti kepada pasien. Hal ini membantu pasien dalam pengambilan keputusan yang informasi-berbasis tentang perawatan mereka. Selain itu, penyedia layanan kesehatan juga harus siap untuk menangani keluhan dan masalah yang mungkin timbul selama perawatan. Mereka harus memiliki mekanisme internal yang efektif untuk menangani keluhan pasien, serta berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa jika diperlukan. Dalam konteks ini, penting untuk mendorong kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan, pasien, dan badan regulasi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki isu-isu yang mungkin muncul dalam kontrak pelayanan kesehatan. Peningkatan komunikasi dan pemahaman bersama akan membantu memperkuat hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

Dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang hak pasien, komitmen penyedia layanan kesehatan untuk pemenuhan hak-hak tersebut, dan kolaborasi yang efektif antara semua pihak terlibat, termasuk pasien, adalah elemen kunci dalam menjaga integritas sistem pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang

layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk perbaikan dalam praktik pelayanan kesehatan dan regulasi yang relevan.

#### 4. Tantangan dalam Implementasi Kontrak Pelayanan Kesehatan

Studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kontrak pelayanan kesehatan. Tantangan utama termasuk masalah kepatuhan pasien terhadap kewajiban mereka, terutama dalam hal pembayaran dan pemenuhan informasi medis. Selain itu, perlindungan data pasien juga menjadi isu penting dalam konteks kontrak kesehatan. Penyelesaian sengketa antara pasien dan penyedia layanan juga dapat menjadi kompleks, dan beberapa pasien mungkin kesulitan dalam mengakses mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Syarat sahnya kontrak atau perjanjian diatur pada pasal 1320 KUHPerdara ada 4 (empat) syarat diantaranya:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu pokok persoalan tertentu;
- suatu sebab yang tidak terlarang.

#### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Kewajiban dan hak pasien dalam kontrak menciptakan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas dan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi kontrak tersebut (Erlina, 2016). Salah satu tantangan utama adalah memastikan kepatuhan pasien terhadap kewajiban mereka, terutama dalam hal pembayaran. Pendidikan pasien dan informasi yang jelas dalam kontrak dapat membantu mengatasi masalah ini. Selain itu, perlindungan data pasien juga menjadi semakin penting, dan regulasi yang lebih ketat mungkin diperlukan untuk memastikan keamanan data medis. Pendidikan pasien dan penyediaan informasi yang transparan dalam kontrak pelayanan kesehatan adalah langkah penting dalam mengatasi sejumlah masalah yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Kesadaran dan pemahaman yang ditingkatkan akan hak dan kewajiban pasien dapat membantu memperbaiki pelaksanaan kontrak dan mendorong pasien untuk memenuhi kewajiban mereka (Keputusan Menteri Kesehatan RI).

Pendidikan pasien dapat mencakup penyuluhan, panduan, dan materi edukatif yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan kepada pasien sebelum atau selama proses perawatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien memiliki pemahaman yang

baik tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam kontrak, termasuk pembayaran, kewajiban mengikuti perawatan, dan hak mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, pasien dapat secara aktif berpartisipasi dalam perawatan mereka dan menghindari ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Selain pendidikan pasien, penyediaan informasi yang jelas dalam kontrak pelayanan kesehatan sangat penting. Kontrak harus dirumuskan secara sederhana dan mudah dimengerti, tanpa menggunakan bahasa hukum yang terlalu teknis. Informasi harus mencakup semua aspek yang relevan, termasuk biaya yang diharapkan, rincian perawatan, waktu yang diperlukan, dan hak dan kewajiban pasien. Informasi ini juga harus mencakup prosedur penyelesaian sengketa dan perlindungan data pasien.

Perlindungan data pasien adalah isu yang semakin penting dalam era digital. Data medis pasien adalah informasi yang sangat pribadi dan sensitif, dan kerahasiaannya harus dijamin. Regulasi yang lebih ketat dan implementasi standar keamanan data yang kuat perlu diterapkan untuk melindungi informasi medis pasien dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan (Fuady, M. I. N, 2021). Ini juga akan memperkuat kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan dan kontrak yang mereka masuki. Dengan pendidikan pasien yang kuat, penyediaan informasi yang jelas dalam kontrak, dan perlindungan data pasien yang cermat, kita dapat mengatasi sejumlah tantangan dalam implementasi kontrak pelayanan kesehatan. Ini akan membantu memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas sesuai dengan hak dan kewajiban mereka, dan menjaga integritas hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan yang kompleks (Radjab, S., & Fuady, M. I. N, 2021).

Penyelesaian sengketa antara pasien dan penyedia layanan juga menjadi isu penting, dan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif perlu dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, mediasi atau arbitrase mungkin merupakan solusi yang lebih cepat dan efisien daripada pengadilan tradisional. Dalam keseluruhan konteks, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran kontrak pelayanan kesehatan dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pasien. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan regulasi dan praktik dalam hukum perdata kesehatan, dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka. Hasil penelitian yang disajikan dalam jurnal ini memberikan landasan yang kuat untuk upaya perbaikan dalam regulasi dan praktik hukum perdata Kesehatan (Sharfina, N. H., et al, 2021). Dalam konteks inilah berbagai langkah-langkah dapat diambil untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka. Pertama-tama, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran dan pemahaman pasien tentang kontrak

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, langkah-langkah pendidikan pasien perlu ditingkatkan. Ini dapat mencakup program pendidikan kesehatan yang lebih terfokus, penyediaan panduan dan materi informatif yang mudah dimengerti, serta lebih banyak interaksi komunikasi antara pasien dan penyedia layanan (Susatyo Herlambang, 2011).

Selain itu, regulasi yang lebih ketat dalam hal perlindungan data pasien perlu diimplementasikan untuk menjaga keamanan informasi medis pasien. Ini mencakup langkah-langkah teknis seperti penggunaan enkripsi yang kuat, akses yang terbatas hanya kepada pihak-pihak yang sah, serta mekanisme pelaporan dan penegakan yang efektif dalam menghadapi pelanggaran keamanan data. Peningkatan transparansi dalam kontrak pelayanan kesehatan juga menjadi kunci. Kontrak harus dirumuskan dalam bahasa yang mudah dimengerti, dan informasi yang relevan harus disediakan dengan jenuh. Ini akan membantu pasien memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik.

Selanjutnya, dalam rangka memfasilitasi penyelesaian sengketa yang efektif antara pasien dan penyedia layanan, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase dapat dipromosikan sebagai metode yang lebih cepat dan efisien daripada proses pengadilan tradisional. Ini akan membantu mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Dengan implementasi langkah-langkah ini, kita dapat memperbaiki kerangka hukum dan praktik dalam hukum perdata kesehatan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kontrak pelayanan kesehatan tetap menjadi alat yang efektif dalam menjaga hak dan kewajiban pasien dalam sistem pelayanan kesehatan yang kompleks. Dengan akhirnya, pasien akan mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka dan menjaga integritas hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

## SIMPULAN

Studi ini mengungkapkan peran kunci yang dimainkan oleh kontrak pelayanan kesehatan dalam mengatur hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Hasil penelitian menyoroti keragaman karakteristik kontrak tersebut, yang mencakup berbagai aspek seperti perawatan, biaya, informasi medis, dan aspek hukum lainnya. Kontrak pelayanan kesehatan bervariasi dalam hal ukuran dan kompleksitas tergantung pada jenis layanan kesehatan yang diberikan, termasuk perawatan rumah sakit, perawatan medis rutin, atau prosedur bedah. Kewajiban dan hak pasien dalam kontrak pelayanan kesehatan merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab penyedia layanan kesehatan. Kewajiban pasien mencakup pembayaran biaya layanan, memberikan informasi medis yang akurat, dan mematuhi

petunjuk perawatan. Hak pasien mencakup hak untuk perawatan berkualitas, informasi yang jujur dan transparan, serta hak untuk mengajukan keluhan dan tuntutan jika terjadi ketidakpatuhan.

Studi ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kontrak pelayanan kesehatan, termasuk masalah kepatuhan pasien, perlindungan data pasien, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam regulasi dan kerangka hukum yang lebih kuat untuk memastikan pemenuhan hak pasien dan kewajiban penyedia layanan kesehatan. Pendidikan pasien dan penyediaan informasi yang jelas dalam kontrak dapat membantu mengatasi masalah kesadaran dan pemahaman pasien tentang hak dan kewajiban mereka. Perlindungan data pasien juga menjadi isu yang semakin penting, dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk menjaga keamanan data medis.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan regulasi dan praktik dalam hukum perdata kesehatan, dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka. Dengan fokus pada pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan, kita dapat memastikan bahwa pasien tetap menjadi pusat perhatian dalam sistem pelayanan kesehatan yang kompleks.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ashabul Kahfi, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan*, vol. 1 no. 1 (Juni 2014), h. 4. (Diakses 06 November 2023)
- Erlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Kontrak Terapeutik*, Vol.3 Nomor 2 (Desember 2016). Diakses pada November 2023.
- Fuady, M. I. N. (2021). *Local Wisdom in Criminal Law Enforcement*. Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode ilmu hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2011), h. 26-27.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004. h.1
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., et al. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Susatyo Herlambang, *Etika Profesi Kesehatan*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011).
- Ta'adi, *Hukum Kesehatan, Pengantar Menuju Perawat Profesional*, (Jakarta : EGC. 2009).
- Copyright @ Yuyut Prayuti, Ridho Cahya Dewangga, Kiagus Handrian Parikesit, Mochamad Subhan, Yuanita